

**DAMPAK KORUPSI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS
(MBG) TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK: ANALISIS
WACANA MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF *DIFFUSE* DAN
SPECIFIC SUPPORT EASTON**

Muhamad Fatkhu Rohman¹, Ririn Dwi Khoerusani², Fina Yuniar³, Sri Tata
Utari⁴, Arin Syafingatulazizah⁵, Evi Haryani Ratriningsih⁶

Program Studi Ilmu Administrasi Negara PSDKU Kebumen, Fakultas Ilmu
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia

Email Korespondensi: rfatkhu1000@student.uns.ac.id¹,
ririndwikhoerusani@student.uns.ac.id², finayuniar@student.uns.ac.id³,
sritatautari09@student.uns.ac.id⁴, arinsyafingatul28@student.uns.ac.id⁵,
eviharyani@student.uns.ac.id⁶

ABSTRAK

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui di Indonesia. Namun dalam pelaksanaannya timbul kasus seperti dugaan korupsi dalam tata kelola program ini, sehingga menarik perhatian banyak publik dimana bisa mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana wacana dugaan korupsi MBG yang beredar di media sosial dapat memengaruhi dukungan masyarakat, baik secara spesifik terhadap program (specific support) maupun secara umum terhadap pemerintah (diffuse support). Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif melalui metode Analisis Wacana Kritis untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang cara masyarakat memaknai dan menyebarkan narasi kepercayaan publik terhadap pemerintah di tengah isu korupsi MBG. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wacana dugaan korupsi MBG di media sosial telah mendorong penurunan dukungan specific (specific support) masyarakat terhadap program, meskipun belum sampai pada tahap hilangnya dukungan difus (diffuse support) terhadap sistem pemerintahan secara keseluruhan. Oleh karena itu, transparansi, penguatan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan secara berkelanjutan menjadi langkah krusial yang perlu diupayakan pemerintah untuk memulihkan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Program Makan Bergizi Gratis; korupsi; political support; media sosial

ABSTRACT

The Free Nutritious Meal Program (MBG) is one of the flagship programs of President Prabowo Subianto's government designed to meet the nutritional needs of school children, pregnant women, and breastfeeding mothers in Indonesia. However, in its implementation, cases such as alleged corruption in the governance of this program have

arisen, so that it attracts the attention of many publics which can affect public trust in the government. This study aims to examine how the discourse of alleged MBG corruption circulating on social media can affect public support, both specifically for the program (specific support) and in general for the government (diffuse support). The approach used is qualitative through the Critical Discourse Analysis method to gain a deep understanding of how the public interprets and disseminates the narrative of public trust in the government in the midst of the MBG corruption issue. The results of the study show that the discourse of alleged MBG corruption on social media has encouraged a decrease in the public's specific support for the program, although it has not reached the stage of losing diffuse support for the government system as a whole. Therefore, transparency, strengthening, monitoring, and continuous policy evaluation are crucial steps that the government needs to take to restore public trust.

Keywords: *Makan Bergizi Gratis (MBG) Program; corruption; political support; social media*

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu inisiatif utama dari pemerintah Presiden Prabowo Subianto yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kecukupan gizi bagi 3B meliputi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui, serta sejumlah kelompok pelajar. Untuk mendukung pelaksanaannya, pemerintah mengalokasikan anggaran yang sangat besar melalui APBN, yakni sebesar Rp85,2 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp268 triliun pada tahun 2026. Namun, pada 3 Juni 2026, program ini menjadi sorotan publik setelah mantan Kepala BGN, Dadan Hindayana ditetapkan sebagai terdakwa oleh Kejaksaan Agung, serta terdakwa lain yaitu wakil Kepala BGN Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung, selaku terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang terkait dengan tata pengelolaan program MBG untuk periode 2025 hingga 2026. Kasus ini berhasil menarik perhatian masyarakat dan menjadi bahan diskusi yang hangat di platform digital. Dalam kurun waktu dua hari setelah pengumuman tersangka, tercatat sebanyak 22.485 percakapan (mentions) dengan total 48,8 juta interaksi di berbagai platform digital.

Dugaan korupsi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih luas terhadap kepercayaan publik. Sebagai program sosial berskala nasional yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, penyimpangan dalam pelaksanaannya dapat mengurangi keyakinan publik terhadap pemerintah dan lembaga-lembaga umum. Situasi ini sejalan dengan prinsip good governance, yang menekankan pentingnya keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan kebijakan publik menjadi faktor penting yang mempengaruhi penilaian masyarakat terhadap kinerja pemerintah (Santoso et. al, 2022). Selain menimbulkan kerugian keuangan negara, kasus ini juga dinilai menghambat pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses gizi yang layak. Di

sisi lain, respons masyarakat di media sosial menunjukkan adanya perbedaan pandangan terhadap kasus tersebut. Analisis percakapan di media sosial menunjukkan bahwa sentimen publik cenderung terbagi, dengan proporsi sentimen positif sebesar 50,5% dan sentimen negatif sebesar 47,2%, serta pola respons yang berbeda pada setiap platform. Kondisi ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kasus korupsi MBG masih beragam dan tingkat kepercayaan publik terhadap program maupun pemerintah perlu mendapat perhatian lebih lanjut melalui penelitian yang mendalam.

Penelitian tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sudah cukup banyak dilakukan sebelumnya. Sebagian besar kajian-kajian tersebut berfokus pada bagaimana masyarakat merespons program ini, serta seberapa besar pengaruh media sosial dalam membentuk opini publik. Salah satunya adalah penelitian Prastiawan & Yuniarto (2025), yang menemukan bahwa sentiment negatif masyarakat terhadap MBG ternyata lebih mendominasi dibandingkan sentiment positif maupun netral. Selain itu, pada penelitian Effendi (2025) juga menunjukkan bahwa media sosial X kini telah menjadi ruang diskusi publik yang banyak digunakan masyarakat untuk membahas dan memperdebatkan berbagai hal seputar kebijakan MBG.

Meskipun demikian, penelitian yang mengkaji dampak isu dugaan korupsi atau penyimpangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terhadap kepercayaan publik masih sangat sedikit. Selain itu, juga belum adanya penelitian yang menggunakan perspektif atau teori *Political Support* dari David Easton (1965,1975). Oleh karena itu penelitian ini memilih untuk menggunakan teori *Political Support* dari David Easton (1965,1975) sebagai pisau analisis. Dalam teori tersebut, *Political Support* dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu *specific support* dan *diffuse support*. *Specific support* berfokus pada dukungan masyarakat terhadap kebijakan, program, ataupun kinerja dari pemerintah yang kemudian didasarkan pada keuntungan atau kerugian yang dihasilkan. Sedangkan *diffuse support* lebih berfokus pada dukungan yang lebih mendalam serta dalam jangka waktu panjang. Melalui teori tersebut, penelitian ini memilih untuk menganalisis wacana dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang berkembang di media sosial terlebih dahulu untuk memahami dampaknya terhadap kepercayaan publik. Pemahaman mengenai hal tersebut diharapkan bisa menjadi dasar dalam merumuskan strategi transparansi serta komunikasi publik yang lebih efektif untuk memperoleh dukungan masyarakat terhadap program atau kebijakan pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan utama. Pertama, bagaimana masyarakat membentuk narasi kepercayaan terhadap pemerintah melalui media sosial setelah terungkapnya dugaan korupsi pada Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tahun 2026. Kedua, apakah kasus tersebut memiliki dampak pada menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG. sebagai kebijakan publik (*specific support*) atau telah meluas menjadi penurunan kepercayaan terhadap pemerintah secara keseluruhan (*diffuse support*). Ketiga, apakah terdapat perbedaan respons dan pandangan masyarakat terhadap kasus korupsi MBG di berbagai platform digital, seperti Instagram, TikTok, dan YouTube. Ketiga permasalahan tersebut menjadi

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (Critical Discourse Analysis/CDA). Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana masyarakat memaknai dan menyebarkan wacana kepercayaan publik terhadap pemerintah melalui media sosial dalam konteks skandal korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal ini sejalan dengan Creswell dan Creswell (2018) yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap fenomena sosial. Denzin dan Lincoln (2018) juga menegaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan *situated activity* yang menempatkan peneliti dalam dunia nyata sehingga memungkinkan pemahaman fenomena secara kontekstual dan interpretatif.

Metode Analisis Wacana Kritis digunakan untuk mengkaji produksi dan reproduksi makna, ideologi, serta relasi kuasa dalam teks digital di media sosial. Analisis dilakukan menggunakan model Fairclough (1995) yang mencakup tiga dimensi, yaitu teks, praktik diskursif, dan praktik sosial-budaya. Kerangka analisis juga menggunakan teori kepercayaan publik dengan konsep *specific support* dan *diffuse support* dari Easton (1965, 1975) untuk melihat bentuk kepercayaan publik terhadap pemerintah. Objek penelitian ini adalah konten media sosial yang membahas kasus dugaan korupsi MBG sejak Juni 2026, termasuk komentar dan interaksi pada platform, Instagram, TikTok, dan YouTube. Pendekatan multi-platform digunakan sebab masing-masing platform mempunyai ciri wacana yang khas, sehingga gabungan data dari berbagai platform tersebut mampu menghasilkan pemahaman yang lebih utuh dan menyeluruh. (Boyd dan Ellison, 2007). Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri (*human instrument*), dengan panduan analisis berdasarkan model Fairclough (1995), yaitu dimensi tekstual, praktik diskursif, dan praktik sosial. Panduan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi indikator *specific support* dan *diffuse support*. Menurut Lincoln dan Guba (1985) menyatakan dalam penelitian kualitatif, peneliti merupakan instrumen utamanya.

Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi empat tahap, yaitu: (1) pengumpulan data (*data collection*), (2) reduksi data (*data reduction*), (3) penyajian data (*data display*), dan (4) penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing and verification*). Keempat komponen ini berlangsung secara interaktif dan saling berhubungan selama proses penelitian. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Guna memastikan validitas data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber ditempuh dengan membandingkan data yang diperoleh dari beragam platform media sosial dengan data sekunder yang bersumber dari sosial media. Triangulasi metode dilakukan dengan mengkombinasikan analisis wacana dan analisis konteks sosial-politik. Menurut Sugiyono (2019), triangulasi

merupakan teknik pengumpulan data yang menggabungkan berbagai sumber dan teknik untuk menguji kredibilitas data.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Wacana Dugaan Korupsi MBG dalam Media Sosial

Selain melalui survei, kepercayaan masyarakat terhadap program MBG dapat dilihat dari kolom komentar di media sosial yang menjadi ruang masyarakat untuk mengemukakan kritik di era digital ini. Untuk memahami kritik dari masyarakat mengenai program MBG, komentar yang ditemui di media sosial kemudian dianalisis menggunakan teori dari Easton (1975) tentang dukungan publik yang klasifikasikan menjadi 2 yaitu *specific support* dan *diffuse support*. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah wacana ada pada batas hilangnya dukungan terhadap program MBG secara spesifik (*specific support*), atau sudah masuk pada sikap apatisme terhadap sistem pemerintahan secara menyeluruh (*diffuse support*).

Tabel 1: Daftar Komentar Masyarakat pada Postingan Terkait Korupsi MBG

1	 studio nallart hr home pak seharus ny jgn dgnti ketua mbg lagi, stopkn mbg aj, kasi kami sembako murah, listrik murah, krna ini jaman brng" naik tapi gaji sgtu" aj 🤔 6-4 · Jawab ♡ 9950 — Lihat 85 balasan ▾	31	 merrypdhta 3 hari Enak ajaaa. Bilang "Salah Kita". Ogah aaahh nanggung dosa org2 itu... Balas ♡ 5
2	 ayy.tan PLISSS HENTIKAN MBG ! KASIH MASYARAKAT BAHAN POKOK MURAH, LISTRIK MURAH 6-4 · Jawab ... ♡ 11.5K — Lihat 65 balasan ▾	32	 sshofi99 2 hari Lah salah kita? Jadi tim byr pajak doang, ga ikut bancakan.. 🙄 Balas ♡
3	 Kristina Sihombing dengan adanya mbg harga sembako membungbung tinggi..tetap aja masyarakat yg dirugikan,hentikan mbg normalkan harga pangan itu baru benar 6-5 · Jawab ♡ 7 — Lihat 2 balasan ▾	33	 arifdc_ 3 hari Saya jujur saya tidak termasuk dari mereka, saya tidak pernah ikut campur dalam perencanaan MBG, saya tidak mau ikut dalam dosa jariyah mereka Balas ♡ 7
4	 jaelani@gmail.com ak sebagai masyarakat yg hidup pas'an saran saya pak klok bsa stop MBG ganti aja dengan sembako dan listrik yg murah itu udah cukup bagi kami yg minim penghasilan 6-4 · Jawab ♡ 55 — Lihat 4 balasan ▾	34	 Anha stop mbg, stop jg bantuan² yg kebanyakan salah sasaran. lnh baik harga kebutuhan makanan yg di stabilkan krn skarang semuanya serba mahal bagi kami org kecil... org kaya tdk berdampak tp bagi kami org kecil sangat terasa sekali 🙄 06-07 · Balas ♡ 12 🗨
5	 Ratna Open Maria Siku berhentikan MBG tdk ad pengaruh sma sklj,kmi ibu orang tua tau kebutuhan ank "kmi mna yg cocok but ank kmi krna setiap ank beda"selerax d 6-4 · Jawab ♡ 9	35	 Leli Handayani Udah lahh...paling bnr ga usah ada MBG...anggaran bs utk hal lain yg emg positif, brguna...pembangunannya dlanjutkan lg... 06-05 · Balas ♡ 97 🗨

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 75 – 86.

6	 duaridulu_ stop mbg,turunkan harga sembako 6-4 Jawab — Lihat 3 balasan ▾	36	 bundaniza kata gua Mending mbg berhenti, gua tiap hari ambil mbg balita juga berasa mubazir ga gua makan karna masakan gaenak 06-06 Balas 82
7	 ferrfley27 3 ming mau menyelamatkan rupiah sebetulnya gampang.. Bubarkan MBG.. 2.788 suka Balas Lihat terjemahan ... — Lihat semua 24 balasan	37	 jhoncena stop mbg lah pak indo udah gawat banget kayaknya 🤔 06-05 Balas 8.454
8	 wahdbnabd 3 ming Yang paling lucu dari ini adalah statement presiden "daripada nanti dikorupsi mending kasih makan anak-anak" eh di korupsi juga 🤔 2.496 suka Balas — Lihat semua 49 balasan	38	 Mega Aditya stop MBG ! turunkan harga sembako. 06-05 Balas 71,4 rb
9	 bambangt1810 3 ming BUBARKAN MBG....SELAMATKAN APBN.....SELAMATKAN APBN.....RUPIAH 18.000.....IHSG 5.000 1.924 suka Balas — Lihat semua 8 balasan	39	 liraa.melinda 24 jam Udah lah salah ngajak2, jangan aja abis ini tetep kaya gini gini aja, tetep gak ada evaluasi dan tindakan. Kek 🤔 emang. Balas
10	 d.sandiki 3 hari Udh dibilangin dr sebelum jadi Presiden,, tp tetep maksa.. 🤔 Uang Triliunan udh keluar, udh dikorupsi juga,hasilnya ?? "KERACUNAN" angka anak stunting turun? ga Balas	40	 abang_nast 3 hari Kalau salah dibilang salah kita semua, giliran senang2 Lo dan kelompok lo yg nikmati, nnnndaaassssmu itu.... Balas
11	 @herliparmansa2288 3 minggu yang lalu Udah tua bukannya mikir akhirat malah sibuk korupsi, begitulah pejabat kita 🤔 102 Balas 15 balasan ▾	41	 ratna_al_zhi 3 hari Eluuu aja kaliiii. Gusti. Giliran salah, rugi, bocor dimana2, mari kita perbaiki. Lah... itu duit ilang apa bisa di kembalikan ? Konoha Balas
12	 hikmathayat 3 hari Pajak rakyat dibuat hura-hura banyak pejabat, trus jika gak bayar pajak salah gitu? Balas	42	 @asepsupriadi3001 3 minggu yang lalu Dulu ahli pembasmi hama, sekarang dia yg jadi hamanya 200 Balas 15 balasan ▾
13	 zimonsabila 3 hari Baru nyadar klo MBG salah tata kelola? Dari dulu ngapain aje? Jangan2 sekarang jg belum sadar klo negara jg salah tata kelola, dibuat ancur2an sama kita? Eh, sama lu dan ... (silakan isi sendiri) Balas	43	 hernisafahura 3 hari Begitu muncul masalah di MBG, bru ngoceh ni yg katanya Dewan Ekonomi Nasional.. Skrg sebut pak hasil monitoring evaluasi anda thdp Koperasi Merah Putih sebelum muncul masalah nya nanti, jgn muncul lgi nanti bilang Perencanaan nya yg salah.. Nda*** lah.. Balas

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 75 – 86.

14	 gempurrrr 3 hari Mundur klo punya malu mah, tanggung jawab nya gimana? Uang udh habis banyak, logistik terbuang cuma-cuma, bocor sana bocor sini. Balas 4	44	 yeni.syam 5 hari Keitungnya kecil dong ya nilai 300jt utk byr ketua BEM UBK dan mahasiswa mah ... Ngegarong duit di negeri ini sangat jor2 an Balas 3
15	 kontraktorumah.id 3 hari Enak aja loe bilang kita.... Gue kagak pernah dilibatkan apapun Balas 2	45	 visi.kitchen 5 hari MBG jadi ladang korupsi, mulai dari pejabat2nya sampe kroco2nya tapi anehnya tetep dipertahankan dan dibela mati2an, hati nurani mereka benar2 sudah mati...Innalillahi Balas 102
16	 naramixx 4 mg Setelah dicopot tolong KPK usut juga gerombolan ini Balas 272	46	 soza_gulo99 4 mg Semoga Tuhan memberkati dan memberikan kekuatan bagi institusi untuk menjaga Marwah dan integritas untuk menjalankan tugas @official.kpk , dipersilahkan untuk melakukan pemeriksaan. Balas 14
17	 @AbdulMalik1958-s4f • 3 mgg lalu Jangan toleransi koruptor, sikat habis, biangnya dulu cari, baru yg lainnya diusut 👍 🗨️ 💬 :	47	 berlietaipassa 4 mg Aroma diperiksa KPK tercium menyengat? Balas 21
18	 anak_pegunungan_ 4 mg yok bisa yok di persilahkan lakukan pemeriksaan @official.kpk Balas 1	48	 thianakbr 4 mg Mampus kau botak Balas 1
19	 rita.wahyunibardan 3 mg Hayoo tanggung jawab lo botak Balas 1	49	 xrzalalna 4 mg Gini nih jadi nya klo bolam di kasih jabatan Balas Lihat terjemahan 1
20	 roy_sant 4 mg KARMA dari Cerita Para Korban KERACUNAN. 🔥🔥🔥 Balas 1	50	 ajengrintan 4 mg assalamualaikum kpk, it's your turn 🔥 Balas Lihat terjemahan 35
21	 hmazizz 4 mg @prabowo AUDIT JUGA PAKKKK Balas 1	51	 irwinnagn 4 mg ADILI DADAN Balas 5
22	 kiflyno13 4 mg Rasain rasain rasain 🔥 Balas 1	52	 rayyanash 4 mg absolute cinema Balas Lihat terjemahan 1
23	 ayukmn 3 mg Saatnya bilang, "KAAAAANNNN.....!!!" Balas 1	53	 senochairina 4 mg Alhamdulillah terkabul doa rakyat yg di zolimi 🙏🙏🙏 Balas 1
24	 indahnr.aini 4 mg benar benar telapak tangan berbalik dalam sekejap mata Balas 1	54	 danangjoyooo 4 mg Wowww berita baik dan mengembirakan sekaleeee 😊 Balas 1

25	 dnrrzz18 4 mg Mantapppp, ku suka Balas	55	 helmygerhanaputra 4 mg Alhamdulillah tertangkap juga, Program nya bagus cuman yg mengelolanya kurang tepat Balas
26	 engdaengg_ 4 mg Usut sampe akar Balas	56	 rachaelia.chaa 4 mg Kasi 🙏 dulu ges Balas
27	 kaishananda 4 mg Biar headlinenya "mantan kepala BGN" bukan "kepala BGN" 🔥 Balas	57	 ilham.marfu22 4 mg Kaan RAKYAT JUGA UUDAAH FEELING FAIR IN LOVE🔥🔥🔥🔥🔥 Balas
28	 _doobless 4 mg kita lihat endingnya dituntut berapa tahun si 🤔🤔 Balas	58	 epras_geo 4 mg BGN (BiGNews) Balas Lihat terjemahan
29	 palembangbelagak_official 4 mg KPK untuk waktunya dipersilahkan 🔥 Balas 51	59	 yindahpss 4 mg Jangan lupa diaudit dulu ini beliau dkk itu, diperiksa apakah ada atau tidak dana bgm yang sampe kekantong mereka... Balas 1
30	 harsa13 4 mg Gasssss jangan berhenti di sini, bongkar semua SPPG Balas	60	 akang_cutter 4 mg Alhamdulillah komen saya sampai ke KPK... Balas Lihat terjemahan 4

Hasil analisis terhadap berbagai unggahan dan komentar pada platform Instagram, TikTok, dan YouTube menunjukkan bahwa isu dugaan korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membentuk dua kecenderungan wacana. Wacana pertama didominasi oleh kritik terhadap tata kelola program, terutama mengenai transparansi anggaran, proses penunjukan mitra, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Sebaliknya, wacana kedua menunjukkan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan dukungan kepada pemerintah karena aparat penegak hukum dianggap telah bertindak cepat dengan menetapkan tersangka sehingga kasus dapat diproses secara hukum. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya menilai keberhasilan suatu program berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, tetapi juga berdasarkan proses pelaksanaannya. Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran menjadi faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kredibilitas program pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Prastiawan dan Yuniarto (2026) yang menunjukkan bahwa sentimen negatif terhadap Program MBG lebih dominan dibandingkan sentimen positif sehingga isu yang berkembang di media sosial dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap keberhasilan program. Temuan ini juga mendukung penelitian Effendi (2025) yang menjelaskan bahwa media sosial telah menjadi ruang publik digital tempat masyarakat membangun, memperdebatkan, serta menyebarkan opini mengenai kebijakan Makan Bergizi Gratis. Dalam perspektif Analisis Wacana Kritis Fairclough (1995), narasi yang berkembang tidak hanya mencerminkan

pendapat individu, tetapi juga merepresentasikan relasi antara masyarakat, media digital, dan pemerintah dalam membentuk makna mengenai akuntabilitas kebijakan publik.

Dominasi Penurunan Specific Support

Analisis menunjukkan bahwa dugaan korupsi Program MBG lebih banyak memengaruhi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap program dibandingkan terhadap pemerintah secara keseluruhan. Narasi yang berkembang didominasi kritik terhadap mekanisme pengawasan anggaran, transparansi pengelolaan program, dan akuntabilitas penyelenggara. Temuan tersebut sesuai dengan konsep specific support yang dikemukakan Easton (1965, 1975), yaitu dukungan masyarakat yang didasarkan pada evaluasi terhadap suatu kebijakan tertentu. Penurunan kepercayaan belum berkembang menjadi diffuse support, karena sebagian masyarakat masih menilai pemerintah dan lembaga penegak hukum tetap menjalankan fungsinya.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Akinola, Omar, dan Mustapha (2022) yang menemukan bahwa pemberitaan korupsi melalui media sosial mempunyai pengaruh nyata terhadap political trust. Semakin intens isu korupsi menjadi agenda utama media, semakin besar peluang munculnya penurunan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Penelitian Zhang dan Zhang (2024) juga menunjukkan bahwa selama krisis, cara media membingkai suatu isu sangat menentukan perubahan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perbedaan Respons pada Setiap Platform Media Sosial

Penelitian ini menunjukkan adanya karakteristik diskusi yang berbeda pada setiap platform media sosial. Platform instagram lebih banyak memperlihatkan komentar singkat yang berfokus pada dampak kasus terhadap keberlanjutan Program MBG. TikTok menunjukkan penyebaran opini yang cepat melalui konten video pendek, sedangkan YouTube menghadirkan diskusi yang lebih mendalam melalui podcast, wawancara, maupun komentar pengguna.

Hasil tersebut sejalan dengan Idrus, Firman, dan Rahmawati (2024) yang menjelaskan bahwa media sosial telah berkembang menjadi ruang partisipasi politik masyarakat dalam mengawasi transparansi pemerintah dan gerakan antikorupsi. Selain itu, Jimoh et al. (2025) menemukan bahwa penggunaan media sosial memperkuat hubungan antara persepsi korupsi dan political trust karena informasi mengenai dugaan penyimpangan dapat menyebar secara cepat dan membentuk opini publik. Dengan demikian, karakteristik platform media sosial turut menentukan pola penyebaran informasi, intensitas diskusi, serta pembentukan persepsi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah.

Implikasi terhadap Kepercayaan Publik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dugaan korupsi pada Program MBG belum sepenuhnya menghilangkan legitimasi pemerintah, tetapi telah menurunkan legitimasi terhadap program sebagai kebijakan publik. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa

transparansi informasi, pengawasan yang efektif, dan penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor utama dalam mempertahankan kepercayaan masyarakat. Temuan ini mendukung pandangan Norris (2017) bahwa political support bersifat dinamis dan dapat dipulihkan apabila pemerintah mampu menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas dan integritas. Apabila pemerintah mampu meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, dan menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat, maka kepercayaan publik terhadap Program MBG berpotensi dipulihkan, di mana hal ini sejalan dengan Al-Azkiya (2024) yang menyatakan bahwa kinerja pemerintah dapat dibuktikan dari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebaliknya, apabila penyimpangan serupa terus berulang tanpa adanya perbaikan tata kelola, maka penurunan specific support dapat berkembang menjadi diffuse support sebagaimana dijelaskan oleh Easton (1975). Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi, akuntabilitas, dan komunikasi publik merupakan faktor penting dalam menjaga legitimasi kebijakan pemerintah di era media sosial.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan, masyarakat membentuk narasi yang didominasi oleh kritik tajam masyarakat terkait korupsi Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komentar dipenuhi kritik agar pelaksanaan program ini dihentikan, keluhan akan pelaksanaan program yang menjadi salah satu penyebab tingginya harga bahan pangan, dan kritik akan lemahnya tata kelola program. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan publik saat ini ada pada tahap penurunan dukungan spesifik (*specific support*) terhadap pelaksanaan program MBG. Masyarakat belum ada pada titik kekecewaan berupa hilangnya dukungan difus (*diffuse support*) yaitu kekecewaan yang menimbulkan apatisme secara keseluruhan pada sistem pemerintahan Indonesia. Bentuk wacana dari ketiga platform memiliki karakteristik yang hampir sama, perbedaan terletak pada jumlah balasan komen yang jauh lebih banyak pada Tik Tok, dilanjutkan oleh Instagram, dan Youtube.

Penelitian ini berkontribusi untuk memperluas analisis wacana di media sosial yang memiliki relevansi terhadap kepercayaan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat dapat berubah ketika suatu lonjakan yang berimplikasi pada hal yang dekat dengan masyarakat. Transparansi dan peningkatan pengawasan serta evaluasi kebijakan bisa menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan publik. Tidak hanya satu kali atau dua kali, pemerintah perlu berkomitmen untuk memperbaiki sistem tata kelola pengawasan dan transparansi pelaksanaan program guna memulihkan kepercayaan publik.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada kuantitas wacana pada 3 platform media sosial saja, sehingga belum sepenuhnya menangkap perspektif masyarakat yang aktif di platform media sosial lain serta yang tidak aktif secara digital. Oleh sebab itu, direkomendasikan pada penelitian selanjutnya untuk menganalisis kepercayaan publik pada berbagai platform media sosial dan secara langsung di lapangan. Penelitian

selanjutnya dapat dilakukan dengan pendekatan analisis data kuantitatif guna mengukur sentimen publik menggunakan skala secara lebih komprehensif.

Daftar Pustaka

- Akinola, O. A., Omar, B., & Mustapha, L. K. (2022). Corruption in the limelight: The relative influence of traditional mainstream and social media on political trust in Nigeria. *International Journal of Communication*, 16, 1460-1481.
- Al-Azkiya, M. E., & Santoso, S. A. (2024). Fenomena Politisasi Birokrasi Dilihat dari Sudut Pandang Administrasi Publik (Studi pada Ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara di Indonesia Saat Pemilu dan Pilkada). *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 10(2), 373–387. <https://doi.org/10.25157/moderat.v10i2.3721>
- Boyd, D. M., & Ellison, N. B. (2007). Social network sites: Definition, history, and scholarship. *Journal of computer-mediated Communication*, 13(1), 210-230.
- CNN Indonesia. (2026, 4 Juni). Fakta-fakta kasus korupsi MBG eks Kepala BGN Dadan cs. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20260604061723-12-1365128/fakta-fakta-kasus-korupsi-mbg-eks-kepala-bgn-dadan-cs>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- David Easton (1965). *A Systems Analysis of Political Life*. New York: Wiley.
- David Easton (1975). "A Re-Assessment of the Concept of Political Support." *British Journal of Political Science*, 5(4), 435–457.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research* (5th ed.). SAGE Publications.
- Effendi, M. R. (2025). *Proses Diskursus di Ruang Publik, Analisis Kualitas Opini Publik Terhadap Program Makan Bergizi Gratis* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis: The critical study of language*. Longman.
- Idrus, I. A., Firman, F., & Rahmawati, R. (2024). Social media for political participation: Bridging the anti-corruption movement in Indonesia and government transparency. *Citizen and Government Review*, 1(1), 11-20.
- Jimoh, A. L., Abdulrasaq, S., & Olawale, Y. A. (2025). Perceived corruption and political trust: The role of social media use. *Transforming Government: People, Process and Policy*.

NURVERSE: Journal of Islamic and Science Studies

ISSN (Print): XXXX-XXXX

e-ISSN (Online): XXXX-XXXX

Website: www.omahnurverse.com

Vol. 01. No. 02. 07-2026. Hlm. 75 – 86.

Koeswayo, P. S., Handoyo, S., Hasyir, D.A. (2024). Investigating the relationship between public governance and the corruption perception index. *Cogent Social Sciences*, 10(1).

Kompas. (2026, 4 Juni). Bagaimana modus korupsi bekas Kepala BGN dan dua wakilnya? Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/bagaimana-modus-korupsi-bekas-kepala-bgn-dan-dua-wakilnya>

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic inquiry*. SAGE Publications.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.

Norris, P. (2017). The conceptual framework of political support. Dalam *Handbook on Political Trust*. Edward Elgar Publishing.

Prastiawan, K. H., & Yuniarto, D. (2026). Analisis Sentimen Publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis dengan Algoritma Naive Bayes. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(4), 5412-5419.

Santoso, S. A. (2022). Penyelenggaraan Pemilihan Umum 2019 dalam Perspektif Good Governance (Studi di Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan Jawa Timur). *Dinamika Governance: Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 12(3). <https://doi.org/10.33005/jdg.v12i3.3425>

Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.

Tribun Lampung. (2026, Juni). Dadan Hindayana tersangka, akademisi UBL: korupsi MBG khianati keadilan sosial. [Tribunlampung.co.id. https://lampung.tribunnews.com/lampung/1210887/dadan-hindayana-tersangka-akademisi-ubl-korupsi-mbg-khianati-keadilan-sosial](https://lampung.tribunnews.com/lampung/1210887/dadan-hindayana-tersangka-akademisi-ubl-korupsi-mbg-khianati-keadilan-sosial)

Zhang, Q., & Zhang, X. (2024). Media influence on public trust during crises: A comparative analysis of different media types and trust dimensions. *Journal of Contingencies and Crisis Management*.